



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI ANTO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **146290**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.260.000.000**

1. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/196 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/196 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 133.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOUL GT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER 1DY / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 184.420.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 697.163.419****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.274.583.419****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 2.274.583.419**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.